

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN PERSETUJUAN -----	ii
HALAMAN PERNYATAAN -----	iii
KATA PENGANTAR -----	iv
DAFTAR ISI -----	vii
DAFTAR TABEL -----	xi
DAFTAR GAMBAR-----	xii
INTISARI -----	xiii
ABSTRACT -----	xiv
BAB I PENDAHULUAN-----	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Rumusan Masalah -----	8
C. Tujuan Penelitian -----	8
D. Manfaat Penelitian-----	9
E. Keaslian Penelitian-----	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA -----	15
A. Politik Hukum -----	15
B. Teori Perundang-Undangan -----	21
C. Tinjauan Mengenai Kewenangan -----	28
D. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik -----	35

E.	Kedudukan dan Kewenangan Kepala Daerah-----	42
F.	Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Kepala Daerah -----	51
G.	Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah -----	56
H.	Pangkat dan Jabatan Aparatur Sipil Negara -----	81
I.	Profil Kota Pangkalpinang-----	87
J.	Tim Walikota Untuk Percepatan Pembangunan-----	91
K.	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2018 -	95
BAB III METODE PENELITIAN -----		105
A.	Pengertian Metode Penelitian -----	105
B.	Sumber dan Jenis Data -----	107
C.	Lokasi Penelitian -----	112
D.	Teknik Penentuan Informan-----	112
E.	Narasumber -----	112
F.	Teknik Pengumpulan Data-----	115
G.	Analisis Data -----	116
1.	Teknik Pengelolaan Data-----	116
2.	Teknik Analisis Data -----	116
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN -----		118

A. Urgensi Pembentukan Tim Walikota Untuk Percepatan Pembangunan Sebagai Percepatan Pelaksanaan Pembangunan di Kota Pangkalpinang Oleh Walikota Kota Pangkalpinang -----	118
1. Motivasi Pembentukan Tim Walikota Untuk Percepatan Pembangunan -----	118
2. Kajian Mengenai Keanggotaan Tim Walikota Untuk Percepatan Pembangunan -----	121
3. Orientasi Mengenai Fungsi dan Sasaran Kerja Tim Walikota Untuk Percepatan Pembangunan-----	122
B. Konsekuensi Yuridis Dibentuknya Tim Walikota Untuk Percepatan Pembangunan Terhadap Organisasi Perangkat Daerah -----	130
1. Kajian Mengenai Dasar Hukum Penerapan Asas Kepastian Hukum Berdasarkan Aspek Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Tim Walikota Untuk Percepatan Pembangunan-----	131
2. Permasalahan Asas Kepastian Hukum Berdasarkan Aspek Kepatutan dan Keadilan dalam Peraturan Walikota Tentang Tim Walikota Untuk Percepatan Pembangunan-----	139

3.	Permasalahan Mengenai Pangkat dan Jabatan Anggota Tim Walikota Untuk Percepatan Pembangunan-----	143
4.	Permasalahan Hukum dalam Pasal-Pasal Peraturan Walikota Tentang Tim Walikota Untuk Percepatan Pembangunan-----	156
5.	Keberadaan Tim Walikota Untuk Percepatan Pembangunan di Pemerintahan Daerah Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik -----	158
	BAB V PENUTUP-----	164
	A. Kesimpulan -----	164
	B. Saran-----	165
	DAFTAR PUSTAKA -----	167

DAFTAR TABEL

Tabel 1	33
Tabel 2	58
Tabel 3	103
Tabel 4	155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 -----	148
-----------------------	------------